**BAB III**

**GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA**

**KERANGKA PENDANAAN**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Implikasi dari pemberlakukan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka prinsip pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari system keuangan negara, hal ini merupakan konsekuensi dari pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah;
3. Perimbangan keuangan Negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah merupakan satu rangkaian proses yang harus saling mendukung satu dan yang lainnya.

Keseluruhan rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah tersebut menjadi wujud pelaksanaan pemberian delegasi kewenangan dan desentralisasi fiskal kepada pemerintah daerah dimana tujuan akhirnya adalah untuk mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat dan meningkatkan aktifitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

* 1. **Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2008-2013**

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah derah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebuah daerah dapat dikatakan mandiri adalah apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, dimana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Namun, Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut nampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat.

Sampai dengan Tahun 2013, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belum pada kekuatan pendapatan asli daerah (PAD). Ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya.

Salah satu indikator kemampuan keuangan daerah adalah Derajat Desentralisasi Fiskal dimana diukur dengan membandingkan kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan atau penerimaan daerah di APBD. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Temanggung periode 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Derajat Desentralisasi Fiskal

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | PAD | PENERIMAAN | % |
| 2008 | 37,923,898,939 | 576,614,217,128 | 6.58 |
| 2009 | 47,327,328,141 | 623,122,779,590 | 7.60 |
| 2010 | 55,211,017,361 | 675,659,734,845 | 8.17 |
| 2011 | 63,343,494,510 | 823,479,890,034 | 7.69 |
| 2012 | 78,514,689,212 | 966,815,573,681 | 8.12 |
| Rata-rata | 56,464,085,633 | 733,138,439,056 | 7.63 |

*Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah)*

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Temanggung periode 2008-2012 adalah sebesar 7,63 %. Angka tersebut menunjukkan bahwa peran PAD dalam pendanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan dapat dikatakan masih kecil. Upaya untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan tata kelola potensi Pajak dan Retribusi Daerah masih harus terus dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan peran dan proporsi PAD sebagai sumber dana pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.Indikator lain yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Indeks Kinerja Keuangan (IKK). Indeks ini merupakan cerminan dari kinerja keuangan daerah baik secara makro maupun mikro yang terukur dan komprehensif. Indeks Kinerja Keuangan meliputi beberapa indikator, yaitu:

1. Ketergantungan Fiskal (KF)

Merupakan persentase dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah dikurang belanja pegawai dalam total pendapatan anggaran daerah di APBD.

Tabel 3.2.

Ketergantungan Fiskal

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | DAU | BLJ. PEGAWAI | SISA | PENDAPATAN | % |
| 2008 | 421,056,329,000 | 312,447,770,721 | 108,608,558,279 | 576,614,217,128 | 18.84 |
| 2009 | 430,269,307,000 | 328,892,390,233 | 101,376,916,767 | 623,122,779,590 | 16.27 |
| 2010 | 438,090,923,000 | 361,708,359,783 | 76,382,563,217 | 675,659,734,845 | 11.30 |
| 2011 | 482,937,812,000 | 398,449,414,257 | 84,488,397,743 | 823,479,890,034 | 10.26 |
| 2012 | 584,158,278,000 | 435,422,407,342 | 148,735,870,658 | 966,815,573,681 | 15.38 |
| Rata-rata | 471,302,529,800 | 367,384,068,467 | 103,918,461,333 | 733,138,439,056 | 14.41 |

*Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah)*

Salah satu hal yang menggembirakan adalah bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh Kabupaten Temanggung tidak semuanya habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Hal tersebut Nampak pada angka indeks yang rata-rata adalah sebesar 14,41 %. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa masih ada DAU yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

1. Kapasitas Penciptaan Pendapatan (KPP)

Merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD berdasarkan Kapasitas Penciptaan Pendapatan di daerah. Proporsi PAD disini tidak dinyatakan terhadap total nilai APBD namun dinyatakan sebagai persentase dari PDRB Kabupaten.

Tabel 3.3.

Kapasitas Penciptaan Pendapatan

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | PAD | PDRB | % |
| 2008 | 37,923,898,939 | 4,125,938,970,000 | 0.92 |
| 2009 | 47,327,328,141 | 4,502,652,250,000 | 1.05 |
| 2010 | 55,211,017,361 | 5,069,020,300,000 | 1.09 |
| 2011 | 63,343,494,510 | 5,603,983,710,000 | 1.13 |
| 2012 | 78,514,689,212 | 6,198,351,810,000 | 1.27 |
| Rata-rata | 56,464,085,633 | 5,099,989,408,000 | 1.09 |
| Sumber : Laporan realisasi APBD dan PDRB Kab. Temanggung (data diolah) | | | |

Dari tabel diatas diketahui bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam menciptakan kenaikan pendapatan masih cukup rendah yaitu berada di angka 1,09 %. Sebuah angka yang menjadi pemacu untuk dapat terus mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah. Namun jika dilihat perkembangan dari tahun-ketahun selalu mengalami kenaikan.

1. Proporsi Belanja Modal (PBM)

Merupakan indikator yang menunjukkan arah pengelolaan belanja pemerintah yang memberikan manfaat jangka panjang sehingga memberikan efek *multiplier* yang lebih besar terhadap perekonomian. PBM dirumuskan sebagai persentase belanja modal dengan total belanja pada APBD.

Tabel 3.4.

Proporsi Belanja Modal

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | BELANJA MODAL | BELANJA | % |
| 2008 | 119,137,750,216 | 611,356,971,071 | 19.49 |
| 2009 | 95,106,051,367 | 606,966,527,368 | 15.67 |
| 2010 | 44,833,858,413 | 662,203,879,316 | 6.77 |
| 2011 | 93,034,426,998 | 816,160,548,955 | 11.40 |
| 2012 | 162,080,116,908 | 956,324,159,986 | 16.95 |
| Rata-rata | 102,838,440,780 | 730,602,417,339 | 14.05 |
| Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) | | |  |

Proporsi belanja modal menggambarkan besarnya persentase belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Selama periode 2008-2012 alokasi belanja modal mengalami fluktuasi sehingga tidak mempunyai trend khusus baik meningkat atau menurun. Untuk hal ini juga sering dipengaruhi oleh kebijakan posting anggaran terkait dengan pengakuan/pencatatan asset pada akhir tahun kegiatan.

1. Kontribusi Sektor Pemerintah (KSP)

Merupakan indikator yang menunjukkan kontribusi pemerintah dalam menggerakkan perekonomian, dimana dinyatakan sebagai persentase total belanja pemerintah terhadap PDRB Kabupaten.

Tabel 3.5.

Kontribusi Sektor Pemerintah

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | BELANJA | PDRB | % |
| 2008 | 611,356,971,071 | 4,125,938,970,000 | 14.817 |
| 2009 | 606,966,527,368 | 4,502,652,250,000 | 13.480 |
| 2010 | 662,203,879,316 | 5,069,020,300,000 | 13.064 |
| 2011 | 816,160,548,955 | 5,603,983,710,000 | 14.564 |
| 2012 | 956,324,159,986 | 6,198,351,810,000 | 15.429 |
| Rata-rata | 730,602,417,339 | 5,099,989,408,000 | 14.27 |
| Sumber : Laporan realisasi APBD dan PDRB Kab. Temanggung (data diolah) | | | |

Kontribusi sektor pemerintah dalam mengerakkan pembangunan daerah relative stabil berada di kisarang angka rata-rata 14,27%. Hal ini menunjukan bahwa belanja sektor pemerintah relative stabil setiap tahunnya.

Berdasarkan 4 (empat) indikator diatas maka dapat diketahui Indeks Kinerja Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2012 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.6.

Indeks Kinerja Keuangan

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | KF | KPP | PBM | KSP | JUMLAH | IKK |
| 2008 | 81.16 | 0.92 | 19.49 | 14.82 | 116.39 | 29.10 |
| 2009 | 83.73 | 1.05 | 15.67 | 13.48 | 113.93 | 28.48 |
| 2010 | 88.70 | 1.09 | 6.77 | 13.06 | 109.62 | 27.40 |
| 2011 | 89.74 | 1.13 | 11.40 | 14.56 | 116.83 | 29.21 |
| 2012 | 84.62 | 1.27 | 16.95 | 15.43 | 118.26 | 29.56 |
| Rata-rata | 85.59 | 1.09 | 14.05 | 14.27 | 115.01 | 28.75 |
| Sumber : Laporan realisasi APBD dan PDRB Kab. Temanggung (data diolah) | | | | |  |  |

Berdasarkan tabel tersebut diatas dimana angka IKK berada di angka yang relatif stabil menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah di Kabupaten Temanggung cenderung tidak mengalami fluktuasi yang tinggi. Hal ini dapat diartikan sebagai kestabilan kinerja keuangan daerah namun dapat juga diartikan sebagai belum optimalnya upaya daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan sehingga belanja pembangunan cenderung juga mengalami kestabilan ketersediaan alokasi anggaran.

Kinerja keuangan daerah juga dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan APBD setiap tahunnya. Berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD maka dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan APBD**
2. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah di APBD Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan yang terjadi di masing-masing komponen pendapatan daerah.

Gambaran lengkap tentang komponen pendapatan di dalam APBD Kabupaten Temanggung selama periode 2008-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7.

Pendapatan Daerah dalam APBD

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

| **U R A I A N** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **Rata-Rata Pertumbuhan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PENDAPATAN DAERAH** | **576,614,217,128** | **623,122,779,590** | **675,659,734,845** | **823,479,890,034** | **966,815,573,681** | **13.94** |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **37,923,898,939** | **47,327,328,141** | **55,211,017,361** | **63,343,494,510** | **78,514,689,212** | **20.03** |
| Pajak Daerah | 5,819,499,860 | 6,194,993,566 | 7,389,439,664 | 11,212,597,968 | 11,470,230,704 | 19.94 |
| Retribusi Daerah | 20,067,480,541 | 25,974,545,346 | 33,365,149,779 | 37,984,477,775 | 14,038,793,022 | 2.17 |
| Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3,082,405,844 | 3,878,614,576 | 5,402,385,086 | 6,682,535,195 | 9,555,591,771 | 32.95 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 8,954,512,694 | 11,279,174,653 | 9,054,042,832 | 7,463,883,572 | 43,450,073,715 | 117.7 |
| **DANA PERIMBANGAN** | **497,563,580,868** | **515,228,881,135** | **522,185,893,892** | **574,917,319,097** | **707,239,144,911** | **9.50** |
| Dana Bagi Hasil | 28,359,251,868 | 33,774,574,135 | 37,300,870,892 | 34,945,207,097 | 35,777,146,911 | 6.40 |
| Dana Alokasi Umum | 421,056,329,000 | 430,269,307,000 | 438,090,923,000 | 482,937,812,000 | 584,158,278,000 | 8.80 |
| Dana Alokasi Khusus | 48,148,000,000 | 51,185,000,000 | 46,794,100,000 | 57,034,300,000 | 87,303,720,000 | 18.17 |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **41,126,737,321** | **60,566,570,314** | **98,262,823,592** | **185,219,076,427** | **181,061,739,558** | **48.94** |
| Pendapatan Hibah | 486,231,000 | 3,450,101,848 | 2,807,704,666 | 696,060,800 | 145,820,000 | 109.17 |
| Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 20,870,379,396 | 33,186,737,016 | 37,428,136,126 | 43,614,720,307 | 60,284,458,558 | 31.64 |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 6,026,638,800 | 12,207,750,000 | 42,742,778,800 | 122,342,105,320 | 99,581,821,000 | 130.08 |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya | 13,743,488,125 | 11,721,981,450 | 15,284,204,000 | 18,566,190,000 | 21,049,640,000 | 12.63 |
| Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) | | |  |  |  |  |

Dari tabel diatas diketahui bahwa rata-rata peningkatan pendapatan daerah di APBD adalah sebesar 13,94 %. Angka tersebut merupakan angka rata-rata dari semua komponen pendapatan daerah, dimana sumbangan kenaikan pendapatan daerah terbesar berasal dari komponen lain-lain pendapatan yang sah yaitu sebesar 48,94% dan sumbangan terkecil adalah dari persentasi pertumbuhan kenaikan dana perimbangan sebesar 9,50%.

Pendapatan asli daerah sendiri memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 20,03 %, dimana pertumbuhan terbesar berasal dari lain-lain PAD yang sah dan pertumbuhan terkecil adalah dari retribusi daerah.

1. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan komponen yang menggambarkan untuk apa pendapatan daerah digunakan, dimana selama periode 2008-2012 juga mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan pada pendapatan daerah.

Gambaran lengkap tentang komponen belanja di dalam APBD Kabupaten Temanggung selama periode 2008-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8.

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2008** | | **2009** | | **2010** | | **2011** | | **2012** | |
| **2** | **BELANJA** | **611,356,971,071** | **100.00%** | **606,966,527,358** | **100.00%** | **662,203,879,316** | **100.00%** | **816,160,548,955** | **100.00%** | **956,324,159,986** | **100.00%** |
| **2.1** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **410,463,264,154** | **67.14%** | **433,902,643,778** | **71.49%** | **523,968,868,116** | **79.13%** | **600,658,730,241** | **73.60%** | **639,977,390,628** | **66.92%** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 309,926,055,084 | 50.69% | 339,675,023,000 | 55.96% | 420,371,009,427 | 63.48% | 474,666,829,278 | 58.16% | 540,996,735,761 | **56.57%** |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | 3,360,639 | 0.00% | - | 0.00% | 0 | 0.00% |  | 0.00% | - | **0.00%** |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 17,715,623,937 | 2.90% | 36,944,486,475 | 6.09% | 39,298,203,555 | 5.93% | 60,528,447,883 | 7.42% | 40,922,373,670 | **4.28%** |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 31,639,516,025 | 5.18% | 10,889,005,170 | 1.79% | 19,022,496,861 | 2.87% | 20,885,382,630 | 2.56% | 14,132,312,373 | **1.48%** |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa | 48,562,970 | 0.01% | 47,964,785 | 0.01% | 53,705,198 | 0.01% | 4,298,707,350 | 0.53% | 4,899,805,654 | **0.51%** |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa | 51,004,053,999 | 8.34% | 45,425,697,933 | 7.48% | 43,821,596,815 | 6.62% | 39,285,513,100 | 4.81% | 38,744,388,450 | **4.05%** |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 126,091,500 | 0.02% | 920,466,415 | 0.15% | 1,401,856,260 | 0.21% | 993,850,000 | 0.12% | 281,774,720 | **0.03%** |
| **2.2** | **BELANJA LANGSUNG** | **200,893,706,917** | **32.86%** | **173,063,883,580** | **28.51%** | **138,235,011,200** | **20.87%** | **215,501,818,714** | **26.40%** | **316,346,769,358** | **33.08%** |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 21,599,073,361 | 3.53% | 19,694,364,002 | 3.24% | 21,182,523,181 | 3.20% | 30,724,881,425 | 3.76% | 32,489,153,703 | **3.40%** |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 60,156,883,340 | 9.84% | 58,263,468,211 | 9.60% | 72,218,629,606 | 10.91% | 91,742,510,291 | 11.24% | 121,777,498,747 | **12.73%** |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 119,137,750,216 | 19.49% | 95,106,051,367 | 15.67% | 44,833,858,413 | 6.77% | 93,034,426,998 | 11.40% | 162,080,116,908 | **16.95%** |

Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah)

Belanja daerah Kabupaten Temanggung selama kurun 2008-2012 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12.20%. Realisasi penggunaan belanja tersebsar masih didominasi untuk belanja tidak langsung dengan rata-rata mencapai 71,65% sedangkan Belanja Langsung sebesar 38,35%.

Namun demikian, tingginya belanja tidak langsung ini bukan menggambarkan rendahnya belanja yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat, mengingat belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil secara riil diperuntukan bagi masyarakat maupun desa dalam kerangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Proporsi belanja tidak langsung terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah berkaltan dengan belanja pegawai. Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi belanja langsung selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Sedangkan Realisasi pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 2008-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9.

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **URAIAN** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 309,926,055,084 | 339,675,023,000 | 420,371,009,427 | 474,666,829,278 | 540,996,735,761 |
| 1 | Belanja Pegawai | 309,926,055,084 | 339,675,023,000 | 420,371,009,427 | 474,666,829,278 | 540,996,735,761 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B | BELANJA LANGSUNG | 38,316,992,462 | 36,637,913,819 | 62,876,066,056 | 38,129,026,411 | 35,495,947,796 |
| 1 | Belanja Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran | 27,971,475,243 | 29,479,384,452 | 30,821,916,353 | 33,772,128,361 | 24,438,598,684 |
| 2 | Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 8,717,111,119 | 6,769,132,367 | 30,821,916,353 | 4,123,044,550 | 9,449,623,362 |
| 3 | Belanja Peningkatan Disiplin Aparatur | 1,628,406,100 | 389,397,000 | 1,232,233,350 | 233,853,500 | 1,607,725,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **JUMLAH** | **348,243,047,546** | **376,312,936,819** | **483,247,075,483** | **512,795,855,689** | **576,492,683,557** |

Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kebutuhan aparatur yang cukup signifikan kenaikannya adalah untuk belanja pegawai. Hal ini menyesuaiakan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan kenaikan gaji pokok PNS setiap tahunnya.

Adapun gambaran proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10.

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Total Belanja Untuk Pemenuhan** | **Total Pengeluaran** | **Prosentase** |
| **Kebutuhan Aparatur (Rp.)** | **(Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) Rp.** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Tahun Anggaran 2008 | 348,243,047,546 | 617,042,475,207 | 56.44% |
| 2 | Tahun Anggaran 2009 | 376,312,936,819 | 616,205,294,407 | 61.07% |
| 3 | Tahun Anggaran 2010 | 483,247,075,483 | 669,631,071,916 | 72.17% |
| 4 | Tahun Anggaran 2011 | 512,795,855,689 | 825,808,207,975 | 62.10% |
| 5 | Tahun Anggaran 2012 | 576,492,683,557 | 971,287,273,930 | 59.35% |
|  |  |  |  |  |

Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran berfluktuasi dan mempunyai kecenderungan menurun, sehingga alokasi anggaran dapat difokuskan pada pembiayaan pembangunan untuk masyarakat.

Jika dilhat dari pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Temanggung 2008-2012 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11.

Pengeluaran Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **Rata-rata** |
| **Pertumbuhan** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 309,926,055,084 | 339,675,023,000 | 420,371,009,427 | 474,666,829,278 | 540,996,735,761 | 15.06% |
| 1 | Belanja Pegawai | 309,926,055,084 | 339,675,023,000 | 420,371,009,427 | 474,666,829,278 | 540,996,735,761 | 15.06% |
| 2 | Belanja Bunga |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | BELANJA LANGSUNG | 38,316,992,462 | 36,637,913,819 | 62,876,066,056 | 38,129,026,411 | 35,495,947,796 | 5.24% |
| 1 | Belanja Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran | 27,971,475,243 | 29,479,384,452 | 30,821,916,353 | 33,772,128,361 | 24,438,598,684 | -2.03% |
| 2 | Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 8,717,111,119 | 6,769,132,367 | 30,821,916,353 | 4,123,044,550 | 9,449,623,362 | 93.89% |
| 3 | Belanja Peningkatan Disiplin Aparatur | 1,628,406,100 | 389,397,000 | 1,232,233,350 | 233,853,500 | 1,607,725,750 | 161.71% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | PEMBIAYAAN | - | - | 1,216,506,415 | - | 5,000,000,000 | 25.00% |
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | - | 5,000,000,000 | 25.00% |
| 2 | Pembayaran pokok hutang | - | - | 1,216,506,415 | - | - | 25.00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **JUMLAH** | **348,243,047,546** | **376,312,936,819** | **484,463,581,898** | **512,795,855,689** | **581,492,683,557** | **14.01%** |

Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dikethaui bahwa belanja wajib bertujuan untuk menjamin kelangsungan pendanaan pelayanan dasar masyarakat serta belanja mengikat yang dibutuhkan secara terus menerus sepert belaja pegawai, belanja barang dan jasa.

1. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD.

Gambaran pembiayaan daerah selama periode 2008-2012 adalah seperti tersebut pada tabel berikut:

Tabel 3.12.

Pembiayaan Daerah dalam APBD

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

| **Uraian** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **Rata-rata Pertumbuhan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PEMBIAYAAN NETO** | **64,966,037,951** | **23,623,601,419** | **32,765,542,921** | **23,381,624,341** | **10,509,936,952** | (27.16) |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **70,661,542,087** | **32,862,368,468** | **40,192,735,521** | **33,029,283,361** | **25,473,050,896** | (17.97) |
| Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 56,880,649,463 | 30,233,284,008 | 39,779,853,641 | 32,765,542,921 | 23,381,624,341 | (15.39) |
| Pencairan Dana Cadangan | 10,426,478,900 |  |  |  |  |  |
| Penerimaan perhitungan pihak ketiga | 0 |  |  |  |  |  |
| Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah | 0 | 2,629,084,460 | 412,881,880 | 263,740,440 |  | (60.21) |
| Penerimaan Piutang Daerah | 3,354,413,724 |  |  |  | 2,091,426,555 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **5,695,504,136** | **9,238,767,049** | **7,427,192,600** | **9,647,659,020** | **14,963,113,944** | 31.90 |
| Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 |  | 5,000,000,000 | 7,826,780,813 | 56.54 |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 2,808,209,990 | 4,012,700,750 | 4,860,240,000 | 2,515,000,000 | 3,004,945,750 | 8.81 |
| Pembayaran Pokok Hutang | 0 | 1,216,506,415 |  |  |  |  |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | - |  |  |  |  |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga | 2,887,294,146 | 4,009,559,884 | 2,566,952,600 | 2,132,659,020 | 4,131,387,381 | 19.92 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SiLPA** | **64,966,037,951** | **23,623,601,419** | **32,765,542,921** | **23,381,624,341** | **10,509,936,952** | (27.16) |
| Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) | | |  |  |  |  |

Dari tabel diatas diketahui bahwa pembiayaan netto pada APBD memiliki angka pertumbuhan yang cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut juga terbaca di Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) setiap tahunnya yang juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Masih adanya SiLPA pada APBD menunjukkan 2 (dua) kemungkinan perhitungan, yaitu ketidakakuratan pada perencanaan pembiayaan belanja program/kegiatan dan dikarenakan oleh efisiensi di pelaksanaan program/kegiatan.

Defisit riil Kabupaten temanggung selama kurun 2008-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13.

Defisit Riil

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | REALISASI PENDAPATAN DAERAH | 576,614,217,128 | 623,122,779,590 | 675,659,734,845 | 823,479,890,034 | 966,815,573,681 |
|  | Dikurangi Realisasi: |  |  |  |  |  |
| 2 | Belanja Daerah | 611,356,971,071 | 606,966,527,358 | 662,203,879,316 | 816,160,548,955 | 956,324,159,986 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 5,685,504,136 | 9,238,767,049 | 7,427,192,600 | 9,647,659,020 | 14,963,113,944 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A | Defisit Riil | (40,428,258,079) | 6,917,485,183 | 6,028,662,929 | (2,328,317,941) | (4,471,700,249) |
|  | Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SILPA | 56,880,649,463 | 30,233,284,008 | 39,779,853,641 | 46,221,398,450 | 44,156,820,949 |
| 5 | PENCAIRAN DANA CADANGAN | 10,426,478,900 | - | - | - |  |
| 6 | PENERIMAAN PINJAMAN | - | - | - | - |  |
| 7 | PENERIMAAN PIUTANG | 3,354,413,724 | 2,629,084,460 | 412,881,880 | 263,740,440 | 2,091,426,555 |
| 8 | PENERIMAAN RETENSI | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B | Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan | 70,661,542,087 | 32,862,368,468 | 40,192,735,521 | 46,485,138,890 | 46,248,247,504 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A-B | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | 30,233,284,008 | 39,779,853,651 | 46,221,398,450 | 44,156,820,949 | 41,776,547,255 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah)

Sedangkan komposisi untuk menutup defisit dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14.

Defisit Riil Anggaran

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

| No. | Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REALISASI PENDAPATAN DAERAH | 576,614,217,128 | 623,122,779,590 | 675,659,734,845 | 823,479,890,034 | 966,815,573,681 |
|  | Dikurangi Realisasi: |  |  |  |  |  |
| 2 | Belanja Daerah | 611,356,971,071 | 606,966,527,358 | 662,203,879,316 | 816,160,548,955 | 956,324,159,986 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 5,685,504,136 | 9,238,767,049 | 7,427,192,600 | 9,647,659,020 | 14,963,113,944 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A | Defisit Riil | (40,428,258,079) | 6,917,485,183 | 6,028,662,929 | (2,328,317,941) | (4,471,700,249) |
|  | Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SILPA | 56,880,649,463 | 30,233,284,008 | 39,779,853,641 | 46,221,398,450 | 44,156,820,949 |
| 5 | PENCAIRAN DANA CADANGAN | 10,426,478,900 | - | - | - |  |
| 6 | PENERIMAAN PINJAMAN | - | - | - | - |  |
| 7 | PENERIMAAN PIUTANG | 3,354,413,724 | 2,629,084,460 | 412,881,880 | 263,740,440 | 2,091,426,555 |
| 8 | PENERIMAAN RETENSI | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B | Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan | 70,661,542,087 | 32,862,368,468 | 40,192,735,521 | 46,485,138,890 | 46,248,247,504 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A-B | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | 30,233,284,008 | 39,779,853,651 | 46,221,398,450 | 44,156,820,949 | 41,776,547,255 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah)

Untuk menutup defisit riil anggaran dimaksud, komponen SiLPA memepunyai proporsi yang cukup signifikan. Adapun secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15.

Komposisi penutup Defisit Riil Anggaran

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Proporsi dari Total Defisit Riil** | | | | |
| **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** |
| 1 | SILPA | 140.70% | 437.06% | 659.85% | 1985.18% | 987.47% |
| 2 | PENCAIRAN DANA CADANGAN | 25.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | PENERIMAAN PINJAMAN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | PENERIMAAN PIUTANG | 8.30% | 38.01% | 6.85% | 11.33% | 46.77% |
| 5 | PENERIMAAN RETENSI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah)

Adapun komposisi SiLPA adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2008** | | **2009** | | **2010** | | **2011** | | **2012** | |
| **Rp.** | **%** | **Rp.** | **%** | **Rp.** | **%** | **Rp.** | **%** | **Rp.** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jumlah SiLPA | 56,880,649,463 | 100% | 30,233,284,008 | 100% | 39,779,853,641 | 100% | 46,221,398,450 | 100% | 44,156,820,949 | 100% |
| 2 | Pelampauan penerimaan PAD | - | 0.00% | - | 0.00% |  | 0.00% | 1,159,449,858 | 2.51% | 2,701,437,443 | 6.12% |
| 3 | Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan | 8,739,570,013 | 15.36% | 9,997,826,009 | 33.07% | 5,175,021,120 | 13.01% | 783,446,211 | 1.69% | - | 0.00% |
| 4 | Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan daerah yang Sah | - | 0.00% | 13,422,970,434 | 44.40% | 1,565,591,597 | 3.94% | 13,080,834,455 | 28.30% | 1,359,188,553 | 3.08% |
| 5 | Sisa penghematan belanja | 44,131,519,566 | 77.59% | 4,245,534,965 | 14.04% | 30,906,581,054 | 77.69% | 27,066,280,545 | 58.56% | 35,171,117,846 | 79.65% |
| 6 | Kewajiban kepada pihak ketiga belum dibayarkan | 4,009,559,884 | 7.05% | 2,566,952,600 | 8.49% | 2,132,659,870 | 5.36% | 4,131,387,381 | 8.94% | 4,925,077,107 | 11.15% |
| 7 | Kegiatan lanjutan | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |  | 0.00% | - | 0.00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sisa Lebih perhitungan Anggaran selama kurun 2008-2012 dipengaruhi oleh pelampauan target pendapatan, sia penghematan belanja dan adanya retensi yang dibayarkan pada tahun anggaran selanjutnya.

1. **Neraca Daerah**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 2008-2012 seperti terlihat pada Tabel III.5 dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

Tabel 3.17.

Rata-rata Neraca Daerah

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

| **Uraian** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **Rata-rata pertumbuhan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASET** |  |  |  |  |  |  |
| **ASET LANCAR** |  |  |  |  |  |  |
| Kas di Kas Daerah | 26,650,857,698 | 35,192,098,591 | 44,026,090,415 | 38,990,056,674 | 33,600,288,117 | 7.97 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 3,699,397,608 | 4,814,851,788 | 2,314,421,474 | 5,270,406,855 | 3,074,820,114 | 16.07 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 105,230,150 | 19,006,900 | 112,627,140 | 419,652,046 | 227,514,518 | 159.36 |
| Kas di BLUD | - | - | - | - | 4,937,034,579 |  |
| Investasi jangka Pendek | - |  |  |  |  |  |
| Piutang Pajak | 26,094,046 | 66,618,113 | 57,713,489 | 99,433,910 | 113,985,728 | 57.21 |
| Piutang Retribusi | - |  | 1,884,590,998 | 6,876,250,290 | 4,327,605,254 | 113.90 |
| Piutang Lain-lain | 1,658,232,608 | 2,168,343,207 | 590,996,879 | 580,484,042 | 686,896,092 | (6.36) |
| Bagian Lancar TPTGR | 7,675,000 | 7,700,000 | 18,610,000 | 55,353,029 | 35,983,029 | 76.11 |
| Persediaan | 5,853,110,717 | 5,000,667,411 | 7,803,535,424 | 8,068,396,868 | 8,744,729,115.93 | 13.32 |
| **Jumlah Aset lancar** | **38,000,597,827** | **47,269,286,010** | **56,808,585,819** | **60,360,033,714** | **55,748,856,546.93** | 10.80 |
| **INVESTASI** |  |  |  |  |  |  |
| **INVESTASI JANGKA PANJANG** |  |  |  |  |  |  |
| ***Investasi Non Permanen*** |  |  |  |  |  |  |
| Investasi Non Permanen | 9,039,537,524 | 7,209,035,814 | 8,565,956,129 | 8,302,215,689 | 5,356,584,722 | (10.00) |
| **Jumlah Investasi Non Permanen** | **9,039,537,524** | **7,209,035,814** | **8,565,956,129** | **8,302,215,689** | **5,356,584,722** | (10.00) |
| ***Investasi Permanen*** |  |  |  |  |  |  |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 26,228,984,529 | 29,184,077,529 | 32,218,577,287 | 34,733,577,287 | 57,974,935,710.56 | 24.10 |
| **Jumlah Investasi Permanen** | **26,228,984,529** | **29,184,077,529** | **32,218,577,287** | **34,733,577,287** | **57,974,935,710.56** | 24.10 |
| **Jumlah Investasi jangka Panjang** | **35,268,522,053** | **36,393,113,343** | **40,784,533,416** | **43,035,792,976** | **63,331,520,432.56** | 16.98 |
| **ASET TETAP** |  |  |  |  |  |  |
| Tanah | 295,835,758,793 | 297,070,283,973 | 304,301,325,837 | 305,404,971,255 | 480,984,049,529 | 15.18 |
| Peralatan dan mesin | 117,777,595,066 | 125,031,610,533 | 128,619,486,093 | 144,616,361,331 | 232,812,138,256 | 20.61 |
| Gedung dan bangunan | 441,728,635,292 | 491,641,191,041 | 492,115,075,679 | 532,693,561,571 | 691,535,860,607 | 12.37 |
| Jalan, irigasi, dan jaringan | 880,126,638,440 | 901,076,787,958 | 905,917,178,152 | 916,463,832,040 | 958,838,671,759 | 2.18 |
| Aset tetap lainnya | 16,887,041,845 | 21,490,283,177 | 20,175,923,930 | 30,825,841,130 | 51,972,841,864 | 35.63 |
| Konstruksi dalam pengerjaan | 16,939,925,600 | 2,051,361,757 | 11,739,589,000 | 2,755,751,600 | 1,290,969,700 | 63.68 |
| **Jumlah Aset Tetap** | **1,769,295,595,036** | **1,838,361,518,439** | **1,862,868,578,691** | **1,932,760,318,927** | **2,417,434,531,715** | 8.52 |
| **DANA CADANGAN** |  |  |  |  |  |  |
| Dana Cadangan | - |  |  | 5,000,000,000 | 12,826,780,813 |  |
| **Jumlah Dana cadangan** | **-** | **-** | **-** | **5,000,000,000** | **12,826,780,813** |  |
| **ASET LAINNYA** |  |  |  |  |  |  |
| Aset Lain-Lain | 2,463,325,480 | 3,524,011,148 | 4,624,519,667 | 5,533,054,452 | 3,985,881,834 | 16.49 |
| **Jumlah Aset Lainnya** | 2,463,325,480 | 3,524,011,148 | 4,624,519,667 | 5,533,054,452 | 3,985,881,834 | 16.49 |
| **JUMLAH ASET DAERAH** | **1,845,028,040,396** | **1,925,547,928,940** | **1,965,086,217,593** | **2,046,689,200,069** | **2,553,327,571,341.49** | 8.83 |
| **KEWAJIBAN** |  |  |  |  |  |  |
| **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** |  |  |  |  |  |  |
| Utang perhitungan pihak ketiga | 222,201,448 | 209,562,683 | 105,551,000 | 52,271,116 | 63,110,073 | (21.27) |
| Utang jangka pendek lainnya | 5,207,240,365 | 2,561,121,985 | 2,165,474,850 | 4,271,845,357 | 5,036,205,740 | 12.22 |
| **Jumlah Kewajiban jangka Pendek** | **5,429,441,813** | **2,770,684,668** | **2,271,025,850** | **4,324,116,473** | **5,099,315,813** | 10.33 |
| **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** |  |  |  |  |  |  |
| Utang Dalam negeri Pemerintah Pusat |  |  |  |  |  |  |
| Utang Dalam negeri Pemerintah Daerah Lainnya |  |  |  |  |  |  |
| Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank |  |  |  |  |  |  |
| Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank |  |  |  |  |  |  |
| Utang Jangka Panjang Lainnya |  |  |  |  |  |  |
| **Jumlah Kewajiban jangka Panjang** | - | - | - | - | - |  |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | **5,429,441,813** | **2,770,684,668** | **2,271,025,850** | **4,324,116,473** | **5,099,315,813** | 10.33 |
| **EKUITAS DANA** |  |  |  |  |  |  |
| **EKUITAS DANA LANCAR** |  |  |  |  |  |  |
| Cadangan Kas |  |  |  |  |  |  |
| Silpa | 30,233,284,008 | 39,779,853,641 | 46,221,398,450 | 44,156,820,949 | 41,776,547,255 | 9.48 |
| Pajak yang belum disetor | 222,201,448 |  |  |  |  |  |
| Pendapatan yang ditangguhkan | - | 36,540,955 | 126,189,579 | 471,023,510 | - |  |
| Cadangan Piutang | 1,692,001,654 | 2,242,661,320 | 2,551,911,366 | 7,611,521,271 | 5,164,470,103 | 53.11 |
| cadangan Persediaan | 5,853,110,717 | 5,000,667,411 | 7,803,535,424 | 8,068,396,868.00 | 8,744,729,115.93 | 13.32 |
| Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek | (5,429,441,813) | (2,561,121,985) | (2,165,474,850) | (4,274,845,357) | (5,036,205,740) | 11.74 |
| **JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR** | **32,571,156,014** | **44,498,601,342** | **54,537,559,969** | **56,032,917,241** | **50,649,540,733.93** | 13.08 |
| **EKUITAS DANA INVESTASI** |  |  |  |  |  |  |
| Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang | 35,268,522,053 | 36,393,113,343 | 40,784,533,416 | 43,035,792,976 | 63,331,520,432.56 | 16.98 |
| Diinvestasikan dalam aset tetap | 1,769,295,595,036 | 1,838,361,518,439 | 1,862,868,578,691 | 1,932,760,318,927 | 2,417,434,531,715 | 8.52 |
| Diinvestasikan dalam aset lainnya | 2,463,325,480 | 3,524,011,148 | 4,624,519,667 | 5,533,054,452 | 3,985,881,834 | 16.49 |
| Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka PANJANG |  |  |  |  |  |  |
| **JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI** | **1,807,027,442,569** | **1,878,278,642,930** | **1,908,277,631,774** | **1,981,329,166,355** | **2,484,751,933,981.56** | 8.69 |
| **EKUITAS DANA CADANGAN** |  |  |  |  |  |  |
| Diinvestasikan dalam Dana Cadangan | - | - | - | 5,000,000,000 | 12,826,780,813 |  |
| **JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN** | **-** | **-** | **-** | **5,000,000,000** | **12,826,780,813** |  |
| **JUMLAH EKUITAS DANA** | **1,839,598,598,583** | **1,922,777,244,272** | **1,962,815,191,743** | **2,042,362,083,596** | **2,548,228,255,528** | 8.86 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA** | **1,845,028,040,396** | **1,925,547,928,940** | **1,965,086,217,593** | **2,046,686,200,069** | **2,553,327,571,341.49** | 8.83 |
| Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) | | | |  |  |  |

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2008-2012, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung mencapai 7,91% yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Temanggung meningkat sebesar 7.91% setiap tahun.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar *(current ratio),* rasio kas *(cash ratio)* dan rasio cepat *(quick ratio).* Sedangkan rasio lancar *(current ratio)* adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Untuk menganalisa neraca daerah maka dapat menggunakan analisa rasio likuiditas sebagai berikut:

1. Rasio Lancar

Rasio ini menunjukkan hubungan antara kas dan asset lancar lainnya dalam hal ini dari entitas pemerintah daerah dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancarnya.

Tabel 3.18.

Rasio Lancar

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | AKTIVA LANCAR | KEWAJIBAN JK PENDEK | RASIO |
| 2008 | 38,000,597,827 | 5,429,441,813 | 7.00 |
| 2009 | 47,269,286,010 | 2,770,684,668 | 17.06 |
| 2010 | 56,808,585,819 | 2,271,025,850 | 25.01 |
| 2011 | 60,360,033,714 | 4,324,116,473 | 13.96 |
| 2012 | 55,748,856,547 | 5,099,315,813 | 10.93 |
| Rata-rata | 51,637,471,983 | 3,978,916,923 | 14.79 |

Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah)

Meski terlihat mengalami trend penurunan terutama di 2 (dua) tahun terakhir namun rasio lancar di Tahun 2012 menunjukkan Pemerintah Kabupaten Temanggung masih sangat sehat karena aktiva lancar masih lebih besar daripada kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi.

1. Rasio Cepat

Rasio ini merupakan rasio lancar yang dikurangi tingkat persediaan dari asset sekarang (*current asset*).

Tabel 3.19.

Rasio Cepat

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | AKTIVA LANCAR | KEWAJIBAN JK PENDEK | PERSEDIAAN | RASIO |
| 2008 | 38,000,597,827 | 5,429,441,813 | 5,853,110,717 | 5.92 |
| 2009 | 47,269,286,010 | 2,770,684,668 | 5,000,667,411 | 17.06 |
| 2010 | 56,808,585,819 | 2,271,025,850 | 7,803,535,424 | 25.01 |
| 2011 | 60,360,033,714 | 4,324,116,473 | 8,068,396,868 | 13.96 |
| 2012 | 55,748,856,547 | 5,099,315,813 | 8,744,729,116 | 10.93 |
| Rata-rata | 51637471983 | 3978916923 | 7,094,087,907 | 14.58 |
| Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) | | | | |

Meski mengalami penurunan terutama di 2 (dua) tahun terakhir namun rasio cepat di Tahun 2012 menunjukkan Pemerintah Kabupaten Temanggung masih sangat sehat karena aktiva lancar yang sudah dikurangi persediaan masih lebih besar daripada kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi.

Untuk menganalisa neraca daerah maka dapat juga menggunakan analisa rasio solvabilitas/leverage sebagai berikut:

1. Rasio total hutang terhadap total asset

Rasio ini merupakan rasio yang memberikan gambaran atas jaminan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kemampuan membayar hutang kepada para pemberi pinjaman berdasarkan asset yang dimiliki.

Tabel 3.20.

Rasio Total Hutang terhadap Total Asset

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

| TAHUN | HUTANG | ASET | RASIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 5,429,441,813 | 1,845,028,040,396 | 0.003 |
| 2009 | 2,770,684,668 | 1,925,547,928,940 | 0.001 |
| 2010 | 2,271,025,850 | 1,965,086,217,593 | 0.001 |
| 2011 | 4,324,116,473 | 2,046,689,200,069 | 0.002 |
| 2012 | 5,099,315,813 | 2,553,327,571,341 | 0.002 |
| Rata-rata | 3,978,916,923 | 2,067,135,791,668 | 0.002 |
| Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) | | | |

Angka rasio yang relatif kecil menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang menjadi kewajiban pemerintah daerah karena hutang yang dimiliki masih jauh lebih kecil dari nilai asset yang dimiliki.

1. Rasio hutang terhadap modal

Rasio ini merupakan rasio yang memberikan gambaran atas jaminan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kemampuan membayar hutang kepada para pemberi pinjaman berdasarkan modal yang dimiliki.

Tabel 3.21

Rasio Hutang terhadap Modal

Kabupaten Temanggung

Tahun 2008-2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | HUTANG | MODAL | RASIO |
| 2008 | 5,429,441,813 | 1,839,598,598,583 | 0.003 |
| 2009 | 2,770,684,668 | 1,922,777,244,272 | 0.001 |
| 2010 | 2,271,025,850 | 1,962,815,191,743 | 0.001 |
| 2011 | 4,324,116,473 | 2,042,362,083,596 | 0.002 |
| 2012 | 5,099,315,813 | 2,548,228,255,528 | 0.002 |
| Rata-rata | 3,978,916,923 | 2,063,156,274,745 | 0.002 |
| Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) | | | |

Angka rasio yang relatif kecil menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang menjadi kewajiban pemerintah daerah karena hutang yang dimiliki masih jauh lebih kecil dari nilai modal yang dimiliki.

Adapun data APBD Kabupaten Temanggung pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten temanggung Tahun Anggaran 2013

| **No. Rek** | **Uraian** | **Jumlah (Rp)** | | **Bertambah / (Berkurang)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sebelum Perubahan** | **Setelah Perubahan** | **(Rp)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | **PENDAPATAN** | 991,506,970,000 | 1,039,172,438,000 | 47,665,468,000 |
|  |  |  |  |  |
| 1.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | 84,225,718,000 | 91,966,542,000 | 7,740,824,000 |
|  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 24,544,270,000 | 23,826,100,000 | (718,170,000) |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 13,654,385,000 | 14,656,229,000 | 1,001,844,000 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 9,057,063,000 | 10,831,063,000 | 1,774,000,000 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 36,970,000,000 | 42,653,150,000 | 5,683,150,000 |
|  |  |  |  |  |
| 1.2 | **DANA PERIMBANGAN** | 726,062,537,000 | 749,673,444,000 | 23,610,907,000 |
|  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil | 28,232,623,000 | 51,843,530,000 | 23,610,907,000 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 651,171,674,000 | 651,171,674,000 | - |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 46,658,240,000 | 46,658,240,000 | - |
|  |  |  |  |  |
| 1.3 | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | 181,218,715,000 | 197,532,452,000 | 16,313,737,000 |
|  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 270,000,000 | 1,051,910,000 | 781,910,000 |
| 1.3.2 | Dana Darurat |  |  |  |
| 1.3.3 | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 48,002,715,000 | 31,916,581,000 | (16,086,134,000) |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 108,696,000,000 | 136,253,400,000 | 27,557,400,000 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 24,250,000,000 | 28,310,561,000 | 4,060,561,000 |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **BELANJA DAERAH** | **1,102,506,970,000** | **1,175,501,480,163** | **72,994,510,163** |
|  |  |  |  |  |
| 2.1 | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | 724,388,500,300 | 745,483,287,805 | 21,094,787,505 |
|  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 589,998,111,800 | 597,730,844,785 | 7,732,732,985 |
| 2.1.2 | BELANJA BUNGA | 1,380,000,000 | 1,448,750,000 | 68,750,000 |
| 2.1.3 | BELANJA SUBSIDI |  |  |  |
| 2.1.4 | BELANJA HIBAH | 57,244,051,000 | 62,801,569,520 | 5,557,518,520 |
| 2.1.5 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 23,309,441,000 | 30,470,227,000 | 7,160,786,000 |
| 2.1.6 | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAHAN DESA | 4,254,000,000 | 4,329,000,000 | 75,000,000 |
| 2.1.7 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN | 47,952,896,500 | 47,952,896,500 | - |
| 2.1.8 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 250,000,000 | 750,000,000 | 500,000,000 |
|  |  |  |  |  |
| 2.2 | **BELANJA LANGSUNG** | 378,118,469,700 | 430,018,192,358 | 51,899,722,658 |
|  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 35,481,191,600 | 39,541,189,025 | 4,059,997,425 |
| 2.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 138,007,137,900 | 162,157,140,735 | 24,150,002,835 |
| 2.2.3 | BELANJA MODAL | 204,630,140,200 | 228,319,862,598 | 23,689,722,398 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **DEFISIT** | (111,000,000,000) | (136,329,042,163) | (25,329,042,163) |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | **111,000,000,000** | **136,329,042,163** | **25,329,042,163** |
|  |  |  |  |  |
| 3.1 | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** | 116,000,000,000 | 145,787,728,270 | 29,787,728,270 |
|  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 13,327,565,000 | 41,776,547,255 | 28,448,982,255 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 12,500,000,000 | 12,960,094,515 | 460,094,515 |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |  |  |  |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah | 90,172,435,000 | 90,172,435,000 | - |
| 3.1.6 | Penerimaan piutang daerah |  |  |  |
| 3.1.7 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga | - | 878,651,500 | 878,651,500 |
|  |  |  |  |  |
| 3.2 | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH** | 5,000,000,000 | 9,458,686,107 | 4,458,686,107 |
|  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan |  |  |  |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 1,000,000,000 | 4,533,609,000 | 3,533,609,000 |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang |  |  |  |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah |  |  |  |
| 3.2.7 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga | 4,000,000,000 | 4,925,077,107 | 925,077,107 |
|  |  |  |  |  |
| 3.3 | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan** | - | - | - |

Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah)

* 1. **Kebijakan Pengelolalan Keuangan Periode 2008-2013**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

1. **Kebijakan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Adapun sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
2. Pajak daerah.
3. Retribusi daerah.
4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
5. Lain-lain PAD yang sah.
6. Dana Perimbangan, terdiri dari:
7. Dana Bagi Hasil (DBH).
8. Dana Alokasi Umum (DAU), dan
9. Dana Alokasi Khusus (DAK).
10. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para subyek pajak dan subyek retribusi sehingga wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran sesuai kewajibannya.

Meningkatkan aspek keadilan bagi wajib pajak/retribusi.

Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan.

Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Meningkatkan pemberdayaan aset daerah.

Meningkatkan pola koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan.

Meningkatkan pola koordinasi eksternal dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung meningkatnya PAD.

Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

1. **Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja dilaksanakan melalui pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pelaksanaan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pilihan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan daerah dan prioritas program yang telah dilaksanakan selama kurun 2008-2013 dimaksud diarahkan dalam kerangka perwujudkan Visi “Bersatu untuk Maju dan Sejahtera” dan pelaksanaan Misi Daerah, yaitu:

* 1. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan fasilitasi kehidupan beragama.
  2. Meningkatkan fasilitasi pendidikan, ketrampilan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan kualitas sumberdaya manusia.
  3. Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan secara merata.
  4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
  5. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumberdaya alam dan potensi unggulan daerah menuju pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah.
  6. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup.

Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. *Belanja tidak langsung* yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
2. *Belanja langsung* yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatsxu program dan kegiatan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Kebijakan belanja daerah terkait dengan Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Anggaran daerah untuk belanja pegawai diarahkan untuk mencukupi pembayaran gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil untuk 13 (tiga belas) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok sebesar 7% serta acres, gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta gaji Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu dapat dianggarkan pula untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja serta tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai, disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

1. Belanja Bunga

Anggaran daerah untuk belanja bunga diarahkan untuk pembayaran bunga hutang atas kewajiban pokok pinjaman/hutang.

1. Belanja Subsidi

Belanja subsidi tidak dialokasikan, belanja subsidi adalah belanja dalam rangka bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu.

1. Belanja Hibah
2. Belanja hibah diarahkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
3. Belanja hibah dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada penerima hibah.
4. Belanja hibah diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus dengan pengertian bahwa pemberian hibah ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhxan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Penganggaran belanja hibah memperhatikan asas manfaat, keadilan, dan kepatutan, transparansi, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas.
6. Belanja Bantuan Sosial
   * + - 1. Belanja bantuan sosial diarahkan untuk menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat.
         2. Belanja bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada perorangan dan/atau kelompok masyarakat.
         3. Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak mengikat/tidak secara terus menerus serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
         4. Penganggaran belanja bantuan sosial memperhatikan rasionalitas dan criteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, dan kepatutan, transparansi, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas.
7. Belanja Bagi Hasil

Anggaran daerah untuk belanja bagi hasil diarahkan untuk pemberian bagi hasil atas pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

1. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran daerah untuk belanja bantuan keuangan diarahkan untuk pemberian dana kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kepada partai politik. Besarnya belanja bantuan keuangan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Belanja Tidak Terduga

Anggaran daerah untuk belanja tidak terduga diarahkan untuk penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja tidak langsung hanya dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), kecuali untuk belanja pegawai, dianggarkan pada semua SKPD.

Selanjutnya kebijakan belanja daerah terkait dengan *belanja* langsungdalam rangka pelaksanaan program dan kegiatanditetapkan sebagai berikut:

1. Belanja langsung mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dianggarkan untuk mencapai target kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan (target *output* dan *outcomes*);
2. Belanja langsung dianggarkan pada setiap SKPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
4. **Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus terjadi manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA).

Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan APBD Tahun Angaran selanjutnya adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun berjalan setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.

1. Penerimaan pinjaman daerah.

Manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan pinjaman daerah.

1. Pencairan Dana Cadangan.

Pencairan Dana Cadangan yang telah dibentuk dilakukan untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang dana cadangan.

1. Penerimaan piutang daerah.

Apabkila APBD diprediksi masih mengalami anggaran defisit, maka untuk menutup defisit anggaran, pemerintah daerah melakukan upaya penarikan pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Investasi yang dilakukan pemerintah adalah investasi yang berbentuk atau bersifat jangka panjang dan bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan/atau barang daerah dialokasikan pada BUMD.

1. Pembentukan Dana Cadangan

Dana cadangan dapat dibentuk dalam rangka membiayai kegiatan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

1. Pembayaran pokok hutang.

Manakala terjadi hutang jangka pendek, maka pada pos ini akan dianggarkan sebesar hutang jangka pendek yang diambil.

1. Pembayaran pihak ketiga.

Pembayaran pihak ketiga dilakukan atas kebutuhan pembiayaan untuk retensi atas pelaksanaan kegiatan di tahun sebelumnya.

* 1. **Kerangka Pendanaan Periode 2013-2018**

Pendanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada periode 2013-2018 membutuhkan suatu kajian yang komprehensif dengan menggunakan data dasar seperti yang tertuang pada gambaran pengelolaan keuangan diperiode sebelumnya.

Dengan memperhitungkan potensi pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan dan sumber pendapatan lain yang sah serta program pembangunan daerah yang direncanakan di periode RPJMD 2013-2018 maka dapat disusun analisis dan kerangka pendanaan sebagaimana berikut:

* + - 1. **Kerangka Pendapatan Daerah**

Dengan menggunakan asumsi trend pertumbuhan dimasing-masing komponen pendapatan daerah, baik dari sisi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah diperiode RPJMD sebelumnya maka proyeksi untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagaimana tabel tersebut berikut:

Tabel 3.23.

Kerangka Pendapatan Daerah

Kabupaten Temanggung

Tahun 2014-2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **U R A I A N** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **1** | **PENDAPATAN DAERAH** | **1,136,305,222,000** | **1,248,007,531,136** | **1,317,992,594,969** | **1,383,602,905,568** | **1,464,813,082,250** |
| **1.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **101,922,405,000** | **121,900,487,000** | **127,171,160,000** | **115,600,114,000** | **121,035,621,250** |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 25,486,000,000 | 26,769,671,000 | 27,849,314,000 | 30,234,958,000 | 31,818,635,000 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 24,845,905,000 | 25,077,816,000 | 25,391,186,000 | 25,752,418,000 | 26,097,229,250 |
| 1.1.3 | Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 9,640,000,000 | 10,604,000,000 | 12,748,900,000 | 14,661,235,000 | 16,860,418,000 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 41,950,500,000 | 59,449,000,000 | 61,181,760,000 | 44,951,503,000 | 46,259,339,000 |
| **1.2** | **DANA PERIMBANGAN** | **814,110,167,000** | **901,921,744,136** | **966,067,045,969** | **1,042,030,625,568** | **1,116,553,844,000** |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil | 45,642,604,000 | 53,760,500,000 | 54,486,500,000 | 55,202,500,000 | 56,119,500,000 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 708,764,753,000 | 765,757,350,136 | 827,424,534,969 | 897,867,434,568 | 969,614,832,000 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 56,702,810,000 | 79,403,894,000 | 81,156,011,000 | 85,960,691,000 | 87,819,512,000 |
| 1.2.4 | Dana Insentif daerah | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| **1.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **220,272,650,000** | **224,185,300,000** | **224,754,389,000** | **225,972,166,000** | **227,223,617,000** |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 616,150,000 | 616,150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 43,662,000,000 | 44,815,750,000 | 46,000,989,000 | 47,218,766,000 | 48,470,217,000 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 136,253,400,000 | 136,253,400,000 | 136,253,400,000 | 136,253,400,000 | 136,253,400,000 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya | 39,741,100,000 | 42,500,000,000 | 42,500,000,000 | 42,500,000,000 | 42,500,000,000 |

Sumber : DPPKAD Kab. Temanggung

Dari tabel diatas diproyeksikan rata-rata kenaikan pertumbuhan pendapatan daerah adalah sebesar 6,38%. Kenaikan terbesar diperkirakan berasal dari komponen dana perimbangan yaitu sebesar 7,93% dan komponen terkecil adalah kenaikan di lain-lain pendapatan yang sah.

Proyeksi PAD dilakukan dengan memperhatikan trend dari masing-masing sumber pendapatan, dimana proyeksi kenaikan terbesar berasal dari lain-lain PAD yang sah sedangkan yang terkecil berasal dari peningkatan pajak daerah.

Proyeksi rata-rata pertumbuhan kenaikan dana perimbangan terbesar berasal dari rata-rata pertumbuhan DAU sedangkan yang terkecil adalah berasal dari dana insentif daerah.

Proyeksi rata-rata pertumbuhan kenaikan lain-lain pendapatan yang sah terbesar berasal dari bagi hasil pajak provinsi dan daerah lainnya sedangkan yang terkecil berasal dari dana penyesuian dan otonomi khusus. Proyeksi lain-lain yang sah juga bersifat in-out dengan pengeluaran kecuali untuk dana bagi hasil provinsi.

Namun demikian, kerangka pendapatan sebagaimana tersebut pada table di atas, sangat dipengaruhi oleh perkembangan konsisi perekonomian nasional dan daerah, besaran dana transfer dati pemerintah serta transfer dana dari pemerintah provinsi baik berupa dana bagi hasil maupun bantuan keuangan.

* + - 1. **Kerangka Belanja Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaynan masyarakat dibutuhkan anggaran yang merupakan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama. Adapun proyeksi belanja daerah, pengeluaran priodik belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24.

Proyeksi Belanja dan pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Kabupaten Temanggung

Tahun 2014-2018

| **No.** | **Uraian** | **Data Tahun Dasar** | **Tingkat Pertumbuhan** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp.)** | **( % )** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 540,996,735,761 | 15.06% | 640,401,936,446 | 705,884,654,000 | 747,929,920,000 | 792,929,570,000 | 843,070,687,250 |
| 1 | Belanja Pegawai | 540,996,735,761 | 15.06% | 633,897,936,446 | 695,879,820,000 | 738,493,920,000 | 785,021,570,000 | 836,690,687,250 |
| 2 | Belanja Bagi Hasil |  |  | 4,504,000,000 | 4,700,000,000 | 4,900,000,000 | 5,100,000,000 | 5,300,000,000 |
| 3 | Belanja Bunga |  |  | 2,000,000,000 | 5,304,834,000 | 4,536,000,000 | 2,808,000,000 | 1,080,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | BELANJA LANGSUNG | 35,495,947,796 | 5.24% | 54,966,654,324 | 56,112,457,242 | 57,208,101,959 | 58,325,393,526 | 60,186,596,464 |
| 1 | Belanja Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran | 24,438,598,684 | -2.03% | 30,012,877,709 | 30,685,946,113 | 31,299,665,035 | 31,925,658,336 | 32,564,171,503 |
| 2 | Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 9,449,623,362 | 93.89% | 22,319,674,815 | 22,766,068,311 | 23,221,389,678 | 23,685,817,471 | 24,637,115,470 |
| 3 | Belanja Peningkatan Disiplin Aparatur | 1,607,725,750 | 161.71% | 2,634,101,800 | 2,660,442,818 | 2,687,047,246 | 2,713,917,719 | 2,985,309,491 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | PEMBIAYAAN | 5,000,000,000 | 25.00% | 8,500,000,000 | 27,000,000,000 | 40,500,000,000 | 40,500,000,000 | 33,000,000,000 |
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | 5,000,000,000 | 25.00% | - |  | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | - |
| 2 | Pembayaran pokok hutang | - | 25.00% | - | 18,000,000,000 | 24,000,000,000 | 24,000,000,000 | 24,000,000,000 |
| 3 | Penyertaan modal |  |  | 4,500,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 4 | Pembayaran retensi | 4,000,000,000 | 25.00% | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG** | **585,492,683,557** | **14.01%** | **703,868,590,770** | **788,997,111,242** | **845,638,021,959** | **891,754,963,526** | **936,257,283,714** |
|  | **WAJIB MENGINKAT SERTA PRIORITAS UTAMA** |  |  |  |  |  |  |  |

Sumber : DPPKAD Kab. Temanggung

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tahun 2014-2018 dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

* + - * 1. Belanja Tidak Langsung

Belanja ini meliputi belanja pegawai, yang digunakan untuk gaji PNS, Bupati dan wakil Bupati, Gaji DPRD, tunjangan profesi guru, insentif pajak dan retribusi daerah. Belanja Bagi hasil diperuntukkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundnag-undangan yaitu bagi hasil pajak dan retribusi ke pemerintaha desa dan belanja bunga diperuntukan bagi pembayaran bunga atas pinjaman daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

* + - * 1. Belanja langsung

Yang termasuk di dalam belanja ini adalah belanja yang bersifat untuk penatusahaan, yaitu untuk padministrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengadaan pakaian dinas. Masing-maisng komponen tersebut dirinci lagi ke dalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

* + - * 1. Belanja Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat adalah pembayaran pokok pinjaman, penyertan modal serta pembayaran retensi.

Namun demikian, kerangka belanja daerah sebagaimana tersebut di atas, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi serta kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, tugas pembantuan maupun urusan bersama.

* + - 1. **Kapasitas riil Keuangan daerah**

Kapasitas riil keuangan daerah dapat diproyeksikan dari total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan belanja wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten Temanggung

Tahun 2014-2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Proyeksi** | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pendapatan | 1,133,980,164,950 | 1,248,007,531,000 | 1,317,992,595,000 | 1,383,602,906,000 | 1,464,813,082,250 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | 16,000,000,000 |
| 3 | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 27,022,418,350 | 27,000,000,000 | 27,000,000,000 | 27,000,000,000 | 27,000,000,000 |
| 4 | Penerimaan retensi | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 5 | Penerimaan pinjaman | 76,500,000,000 | 13,500,000,000 | - | - | - |
|  | Total penerimaan | 1,241,502,583,300 | 1,292,507,531,000 | 1,348,992,595,000 | 1,414,602,906,000 | 1,511,813,082,250 |
|  | Dikurangi |  |  |  |  |  |
| 6 | Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib, Mengikat serta Prioritas Utama | 703,868,590,770 | 788,997,111,242 | 845,638,021,959 | 891,754,963,526 | 936,257,283,714 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 537,633,992,530 | 503,510,419,757 | 503,354,573,041 | 522,847,942,474 | 575,555,798,537 |

Sumber : DPPKAD Kab. Temanggung

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keunagan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Adapun rencana penggunaan kapasitas riil dimaksud sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.26.

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil

Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten Temanggung

Tahun 2014-2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Proyeksi** | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| I | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 537,633,992,530 | 503,510,419,757 | 503,354,573,041 | 522,847,942,474 | 575,555,798,537 |
|  | Rencana alokasi penggunaan prioritas I dan II |  |  |  |  |  |
| II.a | Belanja Langsung | 471,362,007,854 | 428,134,238,000 | 429,074,036,000 | 445,434,697,000 | 477,503,756,000 |
| II.b | Pembentukan Dana Cadangan |  |  | - | - | - |
|  | Dikurangi |  |  |  |  |  |
| II.c | Belanja langsung Yang Wajib dan mengingkat serta prioritas utama | 54,966,654,324 | 56,112,457,242 | 57,208,101,959 | 58,325,393,526 | 60,186,596,464 |
| II.d | Pengeluaran Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama | - | - | - | - | - |
| II | Total rencana pengeluaran Prioritas I dan II (II.a+II.b -II.c-II.d) | 416,395,353,530 | 372,021,780,758 | 371,865,934,041 | 387,109,303,474 | 417,317,159,536 |
|  | Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II) | 121,238,639,000 | 131,488,639,000 | 131,488,639,000 | 135,738,639,000 | 158,238,639,000 |
|  | Rencana Alokasi Pengeluaran prioritas III |  |  |  |  |  |
| IIIa | Belanja Tidak langsung | 761,640,575,446 | 837,373,293,000 | 879,418,559,000 | 928,668,209,000 | 1,001,309,326,250 |
|  | Dikurangi |  |  |  |  |  |
| III.b | Belanja Tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama | 640,401,936,446 | 705,884,654,000 | 747,929,920,000 | 792,929,570,000 | 843,070,687,250 |
| III | Total penggunaan prioritas III (III.a-III.b) | 121,238,639,000 | 131,488,639,000 | 131,488,639,000 | 135,738,639,000 | 158,238,639,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Surplus (I-II-III) | - | - | - | - | - |

Sumber : DPPKAD Kab. Temanggung

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Kebutuhan tersebut meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung diluar belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama yang dikelmpokkan menjadi kebutuhna pendanaan prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III.

Kebutuhan pendanaan prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Bupati sebagaimana dimamanatkan dalam RPJMN dan amanat kebijakan nasonal definistif yang harus dilaksankan daerah pada tahun rencana. Program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan public, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

Prioritas II merupakan prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari manalisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan ujnggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Sedangkan prioritas III merupakan alokasi belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada desa.

Rincian kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas dan kapasitas riil keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27.

Kerangka Pendaaan Kapasitas Riil kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten Temanggung

Tahun 2014-2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Alokasi** | | | | | | | | | |
| **Tahun I** | | **Tahun II** | | **Tahun III** | | **Tahun IV** | | **Tahun V** | |
|  |  | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp |
| 1 | Prioritas I dan II | 77.45% | 416,395,353,530 | 73.89% | 372,021,780,757 | 73.88% | 371,865,934,041 | 74.04% | 387,109,303,474 | 72.51% | 417,317,159,537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prioritas III | 22.55% | 121,238,639,000 | 26.11% | 131,488,639,000 | 26.12% | 131,488,639,000 | 25.96% | 135,738,639,000 | 27.49% | 158,238,639,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 100.00% | 537,633,992,530 | 100.00% | 503,510,419,757 | 100.00% | 503,354,573,041 | 100.00% | 522,847,942,474 | 100.00% | 575,555,798,537 |

Sumber : DPPKAD Kab. Temanggung

Penetapan persentase tiap tahun sesuai prioritas bukan merupakan urutan besarnya prosentase tetapi lebih untuk mengurutkan pemenuhan kebutuhan pendanaannya.

* 1. **Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2013-2018**

Kebijakan utama pengelolaan keuangan daerah untuk periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pendapatan daerah

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

1. Optimalisasi pendapatan daerah dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kondisi perekonomian daerah ;
2. Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah;
3. Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan
4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Secara khusus, terjadi beberapa kendala yang dialami dalam meningkatkan pendapatan khususnya di komponen pendapatan asli daerah, yaitu:

* + - 1. Belum sepenuhnya sumber-sumber pendapatan daerah memiliki buku potensi, sehingga dalam penetapan target pendapatan masih bersifat *line item budgeting*.
      2. Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.
      3. Belum optimalnya manajemen pendapatan asli daerah.
      4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
      5. Belum optimalnya pemberdayaan asset daerah.
      6. Belum optimalnya koordinasi internal maupun eksternal dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk itu, kebijakan pendapatan daerah adalah:

Melakukan review atas peraturan perundangan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah.

Melakukan pendataan potensi pendapatan asli daerah.

Mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Meningkatkan Manajemen pendapatan asli daerah.

Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

Meningkatkan pemberdayaan asset daerah.

Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dalam pengelolaan pendapatan daerah

1. Kebijakan belanja Daerah

Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Untuk itu kebijakan pengalokasian belanja daerah di arahkan untuk :

1. Mendukung pelaksanaan misi daerah dalam rangka pencapaian visi daerah;
2. Memenuhi kewajiban daerah berkenaan dengan belanja pegawai seperti gaji Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai daerah. Pengalokasian untuk belanja pegawai ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat atau belanja penatausahaan. Pengalokasian belanja ini tetap berpegang pada prinsip ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
4. Melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah dan pemerintah provinsi, program/kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah daerah serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Bersifat strategis, penting, dan mendesak untuk dilaksanakan;
6. Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok yang dihadapi daerah;
7. Berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat;

Berdasarkan kebijakan sebagaimana tersebut di atas, alokasi anggaran akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah, tugas pembantuan, maupun urusan bersama.

1. Kebijakan pembiayaan daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA).

Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan APBD adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. SiLPA yang dicantumkan dalam RAPBD adalah bersifat prediksi atas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.

1. Penerimaan pinjaman daerah.

Manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan pinjaman daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian *(prudential management),* profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

1. Penerimaan retensi

Penerimaan ini merupakan penerimaan dari pihak ketiga sebagai retensi atas pelaksanaan kegiatan sebelumnya yang masa pemeliharaannya melebihi tahun anggaran berjalan.

1. Pembentukan dana cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan/atau barang daerah dialokasikan pada BUMD.

1. Pembayaran pokok hutang.

Mulai tahun 2015 pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.

1. Pembayaran retensi.

Pada setiap tahun anggaran dianggarkan pembayaran pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

1. Pencairan dana cadangan

Dana Cadangan dicairkan sejumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan